



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Pajak Masyarakat di Grat

Karina Nur Aini¹, Nunuk Indarti²

^{1,2} Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v6i3.35599

Sejarah Artikel

Diterima: 27 Oktober 2025

Disetujui: 25 November 2025

Dipublikasikan: 23 Desember 2025

Abstrak

Kebijakan fiskal memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi fiskal yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran pajak masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji implementasi MBG di Kecamatan Grati sebagai contoh nyata keterkaitan antara kebijakan sosial dan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat pemahaman bahwa pajak memiliki peran nyata dalam membiayai program sosial. Sosialisasi pajak melalui program ini berhasil menumbuhkan *tax morale* dan mengubah persepsi masyarakat dari pandangan "pajak sebagai beban" menjadi "pajak sebagai gotong royong nasional" dan MBG memberikan efek jangka panjang terhadap pendidikan fiskal anak-anak di sekolah. Dengan demikian, MBG berkontribusi tidak hanya dalam pembangunan gizi dan sosial, tetapi juga dalam pembentukan budaya pajak yang sadar, partisipatif, dan berkelanjutan menuju tata kelola fiskal yang berkeadilan dan inklusif.

Keywords:

The Relationship Between Public Programs and Tax Awareness; Tax Awareness; Free Nutritious Meal Program

Abstract

Fiscal policy has a crucial role in supporting national development, one of which is through the Free Nutritious Meal Program (MBG) initiated by the government to reduce stunting rates and improve the quality of human resources. This program not only has an impact on social health and welfare, but also serves as an effective means of fiscal education in fostering public tax awareness. This study uses a qualitative descriptive approach by examining the implementation of MBG in Grati District as a concrete example of the relationship between social and fiscal policies. The results of the study show that transparency and accountability in the implementation of MBG increase public trust in the government and strengthen the understanding that taxes have a real role in financing social programs. Tax socialization through this program has succeeded in fostering tax morale and changing public perception from the view of "tax as a burden" to "tax as national mutual cooperation" and MBG has a long-term effect on children's fiscal education in schools. Thus, MBG contributes not only to nutritional and social development, but also to the formation of a conscious, participatory, and sustainable tax culture towards equitable and inclusive fiscal governance.

© 2025 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional (Heliany, I., 2021). Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ketahanan sosial (Kiftiyah dkk., 2025). Program MBG menurut (Shenia, A. S., dkk., 2025) merupakan kebijakan intervensi sosial untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama pelajar di tingkat sekolah dasar dan menengah. Program ini menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia Indonesia melalui peningkatan kesehatan dan produktivitas jangka panjang. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak terlepas dari dukungan penerimaan negara, terutama pajak. Kenaikan pajak seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dianggap dapat menurunkan daya beli dan kesejahteraan ekonomi.

Masyarakat sering kali belum menyadari bahwa berbagai program sosial seperti MBG dibiayai dari pajak yang mereka bayarkan. Oleh karena itu, mengaitkan keberhasilan MBG dengan kontribusi pajak dapat menjadi strategi efektif untuk menumbuhkan kesadaran pajak. Menurut (Pasamba & Temalagi, 2023) kesadaran pajak adalah pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan serta kemauan sukarela untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak. Kesadaran ini terbentuk dari persepsi positif terhadap manfaat pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat secara langsung manfaat dari pajak dalam kehidupan sehari-hari, tingkat kepatuhan dan kepercayaan terhadap pemerintah cenderung meningkat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menjadi wujud nyata dari redistribusi fiskal, di mana penerimaan pajak digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat Gratit sebagai salah satu wilayah dengan tingkat partisipasi sosial yang tinggi menjadi contoh menarik untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal dapat berimplikasi langsung terhadap perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan di wilayah ini mendapat sambutan positif karena dirasakan manfaatnya secara nyata oleh siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Masyarakat menyadari bahwa bantuan pangan bergizi bukan hanya bentuk perhatian pemerintah terhadap gizi anak, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

Di wilayah seperti Kecamatan Gratit, program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan pelajar dan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah, pemerintah secara tidak langsung memperkuat pondasi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan (Qomarrullah dkk., 2025) Selain manfaat kesehatan, pelaksanaan MBG di masyarakat Gratit juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Banyak orang tua mulai memahami bahwa program tersebut bukanlah bentuk "bantuan gratis" semata, melainkan hasil dari partisipasi seluruh warga negara dalam membayar pajak. Kesadaran ini secara bertahap mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak dari kewajiban yang membebani menjadi bentuk gotong royong nasional dalam membiayai pembangunan.

Dari sisi pendidikan, MBG juga memberikan efek positif terhadap pemahaman generasi muda mengenai peran pajak. Guru-guru di beberapa sekolah di Gratit menggunakan program ini sebagai contoh konkret untuk menjelaskan konsep kontribusi

masyarakat terhadap pembangunan nasional. Dengan pendekatan kontekstual tersebut, siswa tidak hanya memahami pentingnya gizi, tetapi juga belajar tentang tanggung jawab kolektif warga negara melalui pajak. Inisiatif ini berpotensi menanamkan nilai-nilai fiskal sejak dulu, yang di masa depan dapat memperkuat budaya kepatuhan pajak di kalangan generasi muda.

Selain itu, keberhasilan MBG di Grati tidak lepas dari keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pelaksanaan dan pengawasan program. Keterlibatan ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap kebijakan publik yang ada. Misalnya, kelompok ibu-ibu PKK dilibatkan dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi, sementara perangkat desa berperan dalam memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Partisipasi aktif tersebut menciptakan transparansi dan akuntabilitas sosial yang menjadi fondasi penting bagi peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pajak.

Program MBG di Grati juga memberikan pelajaran penting mengenai sinergi antara kebijakan sosial dan kebijakan fiskal. Selama ini, kebijakan fiskal sering dipandang sebatas instrumen ekonomi makro, padahal keberhasilannya sangat bergantung pada penerimaan dan partisipasi masyarakat (Suprapto, F. A., 2025). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai edukatif tentang pajak dalam pelaksanaan MBG, pemerintah dapat mengubah kebijakan sosial menjadi sarana pendidikan fiskal yang efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan literasi fiskal masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan (Amin, H. M., MM, M. A., Wahyunadi, S. E., & Baehaqi, H., 2024). Sebagian masyarakat Grati masih menganggap pajak sebagai beban ekonomi tanpa melihat manfaat langsungnya. Oleh karena itu, pendekatan edukatif menjadi penting. Pemerintah dapat memanfaatkan momentum pelaksanaan MBG untuk menyosialisasikan nilai-nilai fiskal, misalnya melalui kegiatan sekolah, pertemuan wali murid, atau sosialisasi publik yang menekankan bahwa pajak adalah sumber utama pendanaan program sosial yang mereka nikmati.

Program MBG dapat dijadikan model *best practice* bagi daerah lain dalam mengaitkan manfaat program publik dengan penerimaan pajak. Menurut (Ridwan dkk., 2024) dalam studi *OECD* tahun 2021 menunjukkan bahwa masyarakat akan lebih patuh membayar pajak jika mereka melihat adanya *tax return* dalam bentuk pelayanan publik yang nyata seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. MBG dapat menjadi contoh konkret bagaimana pajak dikonversi menjadi manfaat langsung bagi rakyat. Misalnya, pemerintah daerah dapat menampilkan informasi visual di sekolah atau fasilitas umum yang menjelaskan bahwa makanan bergizi tersebut dibiayai dari pajak rakyat. Pendekatan komunikasi publik seperti ini membantu memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap pajak dan menurunkan resistensi terhadap kebijakan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen kebijakan publik dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat di Kecamatan Grati. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana implementasi program MBG mampu membangun persepsi positif masyarakat terhadap penggunaan pajak sebagai sumber pembiayaan program sosial pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud mengidentifikasi hubungan antara tingkat penerimaan masyarakat terhadap manfaat program MBG dengan peningkatan kepatuhan dan partisipasi mereka dalam membayar pajak. Secara lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi dan sosialisasi pemerintah dalam mengaitkan program MBG dengan kontribusi pajak

masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program sosial seperti MBG sebagai sarana edukasi fiskal yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Maharni, dkk., 2024) bahwa program MBG merupakan langkah yang sangat progresif yang dapat menumbuhkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara menyeluruh. Salah satu dampak sosial yang dihasilkan adalah menurunnya tingkat kelaparan, khususnya bagi para pelajar dan balita. Program MBG dapat memberikan asupan nutrisi kepada anak-anak yang berakibat kepada meningkatnya kesehatan dan kinerja akademis mereka. Program ini adalah salah satu langkah proaktif dalam mengatasi kelaparan khususnya di kalangan pelajar dan kelompok rentan. Sementara itu (Septiani, dkk., 2024) dalam tulisannya menyampaikan bahwa program MBG merupakan langkah untuk menuju sistem pendidikan modern, dan difusi inovasi. Akan tetapi ada beberapa kritik untuk program MBG ini, antara lain tentang kesiapan infrastruktur, prioritas dan ketergantungan kepada negara. Selain itu kesesuaian budaya dan adopsi juga diangkat dalam mengadaptasi praktik tersebut ke Indonesia. Keberhasilan di negara Indonesia sangat bergantung pada kemampuan dalam mengadaptasi program MBG sesuai dengan kondisi masyarakat, pengimplementasian MBG, dan cara pendistribusian MBG. Maka, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa pembayaran pajak memiliki manfaat nyata bagi kesejahteraan sosial masyarakat, terutama dalam konteks pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Grati.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif (Adji, T. P., 2024). Data dikumpulkan melalui studi literatur dari dokumen kebijakan pemerintah, laporan Kemenkeu, dan penelitian terdahulu. Data juga diperoleh dari wawancara semi terstruktur dengan masyarakat penerima manfaat, guru, dan aparatur daerah di Kecamatan Grati. Proses analisis dilakukan secara bertahap sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir.

Langkah pertama yaitu reduksi data, dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen kebijakan pemerintah, laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta hasil penelitian terdahulu. Data dari wawancara semi terstruktur dengan masyarakat penerima manfaat, guru, dan aparatur daerah di Kecamatan Grati yang dilaksanakan pada 05–19 Oktober 2025 juga direduksi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Langkah kedua adalah penyajian data (data display), yakni menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi hubungan antar-tema dan menarik makna dari hasil wawancara serta dokumen pendukung. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dibuat berdasarkan pola dan tema yang muncul selama proses analisis, kemudian diverifikasi secara berulang dengan cara membandingkan antara data wawancara, dokumen, dan hasil studi literatur untuk memastikan validitas temuan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara mendalam persepsi dan pengalaman masyarakat serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan fokus kajian di Kecamatan Grati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal

Implementasi MBG yang disertai dengan informasi publik mengenai sumber pendanaannya (pajak) membuat masyarakat mulai memahami bahwa pajak memiliki fungsi nyata dalam membiayai kebutuhan sosial. Transparansi dan akuntabilitas fiskal menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat (Sukma & Nabila, 2025). Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keterbukaan informasi mengenai sumber dana dan mekanisme pelaksanaan menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik. Apalagi penyampaian informasi ini disampaikan oleh akuntan program MBG yang berasal dari masyarakat sekitar. Ketika masyarakat mengetahui bahwa setiap porsi makanan yang diterima anak-anak berasal dari pajak yang mereka bayarkan, muncul rasa tanggung jawab moral untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan program. Transparansi ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan fiskal, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih memahami siklus keuangan negara secara utuh.

Pelaksanaan MBG di berbagai daerah menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang jujur, terbuka, dan mudah dipahami mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Laporan publik mengenai besaran anggaran, proses pengadaan bahan makanan, serta jumlah penerima manfaat menjadi bentuk nyata dari keterbukaan fiskal. Dengan adanya publikasi rutin tersebut, masyarakat dapat memantau langsung penggunaan dana pajak sehingga menumbuhkan rasa percaya dan kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Transparansi yang berkelanjutan menjadi bukti bahwa pemerintah menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab (Santoso dkk., 2025).

Selain itu, akuntabilitas fiskal juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam konteks MBG, pengawasan masyarakat terhadap jalannya program menjadi mekanisme yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Ketika masyarakat diberi ruang untuk ikut mengawasi, mereka merasa memiliki program tersebut, bukan sekadar penerima manfaat pasif. Hal ini memperkuat budaya partisipatif di tingkat lokal, di mana warga terlibat aktif dalam menjaga integritas kebijakan publik (Setiawan, I., 2024). Dengan demikian, transparansi fiskal bukan hanya soal keterbukaan data, tetapi juga menciptakan mekanisme sosial yang mendorong tanggung jawab bersama.

Program MBG juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas fiskal dapat menjadi alat pendidikan publik yang efektif. Melalui sosialisasi di sekolah dan media lokal, pemerintah menjelaskan bagaimana pajak digunakan untuk membiayai program gizi. Anak-anak dan orang tua belajar bahwa kontribusi pajak yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk layanan sosial yang mereka rasakan langsung. Pendidikan semacam ini menanamkan kesadaran fiskal sejak dulu dan membantu membangun generasi yang memahami pentingnya kepatuhan pajak untuk mendukung kesejahteraan bersama.

Dalam praktiknya, transparansi fiskal tidak hanya menyangkut penyampaian informasi keuangan, tetapi juga komunikasi publik yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Pemerintah daerah yang melaksanakan MBG perlu mengemas laporan fiskal dalam bentuk yang sederhana, seperti infografik, papan informasi di sekolah, atau laporan mingguan di media sosial resmi. Langkah ini penting agar pesan tentang keterkaitan antara pajak dan kesejahteraan masyarakat dapat tersampaikan secara efektif, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang belum terbiasa membaca laporan keuangan formal.

Keterbukaan fiskal juga memberikan dampak terhadap perilaku sosial masyarakat. Ketika mereka merasa dilibatkan dan diberi kepercayaan, partisipasi publik dalam mendukung program meningkat. Di beberapa daerah, masyarakat bahkan ikut menyumbang bahan lokal atau tenaga untuk membantu pelaksanaan MBG, karena mereka melihat pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengelola dana pajak dengan baik. Hubungan timbal balik seperti ini menciptakan sinergi antara negara dan warga yang menjadi pondasi penting bagi keberhasilan kebijakan fiskal nasional.

Akuntabilitas fiskal memperkuat *good governance* di lingkungan birokrasi. Aparatur pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG ter dorong untuk bekerja secara efisien dan jujur karena setiap penggunaan dana diawasi secara terbuka. Sistem pelaporan yang transparan juga meminimalisir potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan bahan makanan maupun distribusi program (Darmawan dkk., 2025). Dengan demikian, transparansi fiskal bukan hanya memberi manfaat bagi masyarakat penerima manfaat, tetapi juga memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan itu sendiri.

Dari perspektif ekonomi makro, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam MBG dapat meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal secara keseluruhan (Pujiyanti dkk., 2025). Ketika masyarakat percaya bahwa pajak digunakan secara tepat dan bermanfaat, kepatuhan pajak meningkat secara alami. Peningkatan penerimaan pajak pada akhirnya memperkuat kapasitas fiskal negara untuk membiayai lebih banyak program sosial di masa mendatang. Dengan kata lain, transparansi fiskal menciptakan siklus kebijakan yang saling memperkuat antara penerimaan dan pengeluaran negara. Namun demikian, keberhasilan transparansi dan akuntabilitas fiskal dalam MBG memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pihak. Pemerintah harus konsisten dalam menyampaikan laporan publik secara berkala dan membuka ruang *dialog* dengan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi agar mampu memahami informasi fiskal dan menggunakan haknya dalam melakukan pengawasan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan budaya transparansi ini.

Akhirnya, penerapan transparansi dan akuntabilitas fiskal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal pengelolaan anggaran, tetapi juga pembentukan kepercayaan sosial dan kesadaran kolektif. Ketika masyarakat menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan bersama, maka tumbuhlah rasa memiliki terhadap negara. Kepercayaan ini akan menjadi modal sosial yang kuat dalam mendukung kebijakan fiskal ke depan, menciptakan masyarakat yang tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga memahami dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Sosialisasi Pajak Melalui Program Sosial Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sosialisasi pajak melalui program sosial seperti MBG yang disampaikan oleh perangkat desa setempat merupakan strategi komunikasi fiskal yang efektif dalam membangun pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak. Salah satunya adalah kampanye yang berkeliling di sekitar wilayah Gratia dengan ajakan “Ayo Bayar Pajak”. Selama ini, masyarakat kerap memandang pajak sebagai kewajiban administratif yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Namun, ketika pemerintah mengaitkan program sosial yang dirasakan masyarakat dengan sumber dana pajak, persepsi tersebut mulai berubah. Program MBG menjadi media nyata yang

menjembatani konsep pajak sebagai instrumen pembangunan dengan manfaat sosial yang konkret.

Keterlibatan langsung masyarakat dalam menikmati hasil dari pajak, seperti melalui konsumsi makanan bergizi di sekolah, menciptakan bentuk edukasi fiskal yang kontekstual. Anak-anak, guru, dan orang tua tidak hanya menerima manfaatnya, tetapi juga mempelajari nilai-nilai kontribusi dan tanggung jawab bersama. Sosialisasi pajak melalui MBG secara tidak langsung menanamkan pemahaman bahwa kesejahteraan bersama hanya dapat tercapai bila seluruh warga negara berpartisipasi dalam sistem fiskal. Dengan demikian, MBG bukan sekadar program gizi, tetapi juga sarana pembentukan karakter fiskal masyarakat.

Pendekatan sosialisasi pajak berbasis program sosial memiliki keunggulan dibandingkan kampanye pajak konvensional. Pesan tentang pentingnya pajak menjadi lebih mudah diterima karena disampaikan melalui pengalaman langsung, bukan sekadar himbauan. Ketika masyarakat melihat manfaat nyata dari pajak dalam bentuk layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, rasa kebermanfaatan pajak menjadi lebih kuat. Proses ini menumbuhkan *tax morale*, yaitu motivasi intrinsik untuk membayar pajak dengan kesadaran, bukan paksaan (Agatha, A, 2022).

Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan secara emosional dan empatik lebih mampu menumbuhkan kepercayaan dibandingkan pendekatan rasional semata. Pemerintah yang menyampaikan pesan seperti “pajak Anda memberi makan anak-anak bangsa” mampu menciptakan hubungan emosional antara pembayar pajak dan penerima manfaat (Nataherwin & Maren, 2021). Hubungan emosional ini penting untuk memperkuat legitimasi moral dari sistem perpajakan itu sendiri. Masyarakat tidak lagi melihat pajak sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kepedulian sosial yang mendukung kemajuan generasi masa depan.

Sosialisasi melalui MBG juga memiliki efek berantai terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik lainnya. Masyarakat yang mulai memahami peran pajak dalam program sosial cenderung lebih mendukung kebijakan fiskal pemerintah, seperti perluasan basis pajak atau reformasi subsidi. Kesadaran kolektif ini dapat memperkuat stabilitas fiskal negara dalam jangka panjang. Dengan demikian, MBG berfungsi tidak hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai alat diplomasi fiskal antara negara dan rakyat. Agar dapat memperkuat efektivitas sosialisasi, pemerintah perlu melibatkan berbagai aktor sosial dalam penyebaran pesan fiskal. Guru, tokoh agama, perangkat desa, dan organisasi masyarakat dapat berperan sebagai agen edukasi pajak yang dekat dengan warga. Misalnya, guru dapat menjelaskan kepada siswa bahwa makanan bergizi yang mereka konsumsi dibiayai oleh pajak yang dibayarkan orang tua mereka. Pendekatan interpersonal ini terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam dibandingkan kampanye media yang bersifat satu arah.

Selain aktor sosial, media massa dan media digital juga memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan sosialisasi. Pemerintah dapat memanfaatkan platform digital untuk menampilkan kisah sukses penerima manfaat MBG yang dibiayai pajak. Cerita inspiratif semacam ini dapat menggugah empati publik dan memperkuat citra positif pajak di mata masyarakat. Dengan strategi komunikasi yang kreatif, pesan bahwa “pajak kembali kepada rakyat” dapat diterima dengan cara yang lebih humanis dan persuasif (Martina, M., & Devy, T., 2025). Namun, sosialisasi pajak melalui program sosial tidak akan efektif tanpa konsistensi dan bukti nyata di lapangan. Jika masyarakat

menemukan adanya penyimpangan, ketidaktepatan sasaran, atau kurangnya transparansi dalam pelaksanaan MBG, maka kepercayaan terhadap pemerintah dan motivasi membayar pajak dapat menurun. Oleh karena itu, keberhasilan sosialisasi fiskal harus dibarengi dengan pelaksanaan program yang akuntabel dan tepat guna. Bukti nyata di lapangan menjadi faktor utama yang memperkuat pesan fiskal yang disampaikan pemerintah.

Sosialisasi yang efektif juga memerlukan adaptasi pesan sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat. Di daerah seperti Grati, misalnya, pendekatan yang menggunakan nilai gotong royong dan keadilan sosial lebih mudah diterima dibandingkan pesan formal yang menekankan kewajiban hukum. Dengan mengaitkan pajak dengan nilai-nilai lokal seperti “pajeg kanggo kabecikan bebarengan” (pajak untuk kebaikan bersama), pemerintah dapat membangun kedekatan emosional dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan fiskal. Pada akhirnya, sosialisasi pajak melalui program sosial seperti MBG merupakan investasi jangka panjang dalam membangun budaya pajak di Indonesia. Pendekatan edukatif, partisipatif, dan empatik, masyarakat tidak hanya memahami fungsi pajak, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab kolektif. Ketika kesadaran pajak telah tertanam kuat dalam kehidupan sosial, kepatuhan fiskal tidak lagi bergantung pada sanksi, tetapi lahir dari kesadaran moral dan rasa kebersamaan untuk membangun bangsa.

Perubahan Persepsi Masyarakat Grati terhadap Pemerintah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran telah menjadi katalis penting dalam membentuk persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah. Di tengah berbagai isu ketidakpercayaan publik akibat penyalahgunaan dana publik di masa lalu, MBG muncul sebagai contoh nyata bagaimana pemerintah dapat mengelola pajak dengan akuntabel. Ketika masyarakat menyaksikan secara langsung manfaat dari program yang didanai oleh pajak, muncul keyakinan bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang bermutu.

Kepercayaan publik ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela. Dalam literatur ekonomi perilaku, *voluntary compliance* sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Winda dkk., 2025). Masyarakat yang mempercayai bahwa pemerintah jujur, efisien, dan berpihak pada rakyat cenderung lebih rela membayar pajak tanpa perlu paksaan. Dengan demikian, MBG tidak hanya berperan dalam peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan moral fiskal yang sehat di tingkat akar rumput.

Di daerah wilayah Grati, implementasi MBG telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran negara. Sebelumnya, sebagian warga menganggap pemerintah sebagai entitas yang jauh dan tidak langsung berkontribusi terhadap kehidupan mereka. Namun, melalui MBG, pemerintah hadir secara nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka. Hubungan ini menciptakan interaksi emosional dan kepercayaan sosial yang memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Perubahan persepsi ini juga memperkuat konsep *social contract* antara negara dan warga negara. Dalam kontrak sosial modern, warga menyerahkan sebagian pendapatan mereka dalam bentuk pajak dengan harapan bahwa pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk kesejahteraan bersama. Program seperti MBG

membuktikan bahwa kontrak tersebut benar-benar dijalankan. Ketika masyarakat melihat pajak diwujudkan dalam program yang adil dan berorientasi sosial, rasa keterikatan antara warga dan negara pun meningkat.

Program MBG memberikan dampak psikologis yang positif terhadap cara masyarakat menilai kebijakan fiskal. Program ini membangun citra pemerintah sebagai pelayan publik, bukan sekadar penguasa yang memungut pajak. Pergeseran citra ini sangat penting dalam membangun legitimasi fiskal jangka panjang. Masyarakat yang merasa dihargai dan diperhatikan akan menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian dari sistem fiskal negara, bukan sekadar subjek pajak. Keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi MBG turut memperkuat persepsi bahwa pemerintah terbuka terhadap partisipasi warga. Ketika masyarakat diberi ruang untuk mengawasi, memberikan masukan, atau bahkan berkontribusi dalam pelaksanaan program, kepercayaan terhadap niat baik pemerintah semakin meningkat. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai pihak yang bekerja sepihak, melainkan sebagai mitra pembangunan yang bekerja bersama masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Selain itu, perubahan persepsi terhadap pemerintah juga menurunkan tingkat skeptisme fiskal yang selama ini menjadi penghambat utama kepatuhan pajak. Banyak masyarakat sebelumnya enggan membayar pajak karena merasa hasilnya tidak terlihat. Namun, dengan adanya MBG, mereka dapat melihat hubungan langsung antara pajak dan manfaat sosial yang diterima. Ketika transparansi kebijakan diwujudkan dalam bentuk nyata seperti ini, argumen bahwa “pajak tidak kembali ke rakyat” menjadi semakin tidak relevan.

Program MBG juga berpotensi menjadi model dalam membangun *trust-based governance*, yaitu sistem pemerintahan yang berlandaskan kepercayaan publik (Yanti, N. N. K. 2025). Dalam model ini, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari angka penerimaan pajak, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Ketika kepercayaan sudah terbentuk, efisiensi administrasi pajak meningkat karena masyarakat membayar pajak secara sukarela tanpa harus diawasi ketat oleh apparat. Namun, membangun kepercayaan publik tidak dapat dilakukan sekali waktu, diperlukan konsistensi dan integritas dalam setiap tahap pelaksanaan program. Pemerintah harus menjaga agar MBG terus berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sekali terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan, kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Oleh karena itu, sistem evaluasi, audit publik, dan pelibatan masyarakat perlu terus diperkuat agar persepsi positif terhadap pemerintah tetap terjaga.

Pada akhirnya, perubahan persepsi masyarakat terhadap pemerintah melalui MBG menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik bukan hanya diukur dari hasil material, tetapi juga dari keberhasilan membangun kepercayaan sosial. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah mengelola pajak secara jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat, kepatuhan pajak tumbuh secara alami. Kepercayaan ini menjadi energi sosial yang tak ternilai dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan pembangunan nasional yang inklusif.

Efek Jangka Panjang terhadap Pendidikan Fiskal

Pendidikan fiskal yang tertanam sejak dulu melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak jangka panjang terhadap pola pikir generasi muda. Anak-anak yang setiap hari menerima manfaat langsung dari program tersebut belajar bahwa keberlangsungan layanan publik bergantung pada kontribusi bersama melalui pajak

(Umam, K., dkk., 2025). Tanpa harus dijelaskan secara teoritis, mereka memahami bahwa setiap porsi makanan bergizi yang mereka nikmati merupakan hasil gotong royong nasional. Pemahaman kontekstual seperti ini jauh lebih efektif dalam membentuk kesadaran pajak dibandingkan pendekatan kognitif yang hanya mengajarkan konsep pajak secara abstrak di ruang kelas.

Selain itu, pengalaman konkret ini berperan penting dalam membangun empati sosial. Anak-anak yang memahami bahwa pajak berasal dari masyarakat akan lebih menghargai kontribusi orang tua dan komunitasnya terhadap kesejahteraan bersama. Mereka belajar bahwa pembangunan bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi hasil kerja kolektif seluruh warga negara. Nilai ini menjadi dasar pembentukan karakter generasi yang bertanggung jawab, transparan, dan memiliki kesadaran fiskal tinggi di masa depan. Sekolah memiliki peran strategis dalam memperkuat efek pendidikan pajak yang dihasilkan dari MBG.

Guru dapat mengintegrasikan pengetahuan tentang pajak dan kebijakan publik dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya dengan menjelaskan bahwa makanan yang disediakan sekolah bersumber dari pajak rakyat. Dengan demikian, proses pendidikan formal dan pengalaman sosial berjalan beriringan untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang fungsi pajak. Ini sejalan dengan pendekatan *experiential learning* yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Efek jangka panjang dari pendidikan pajak melalui MBG tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan perilaku sosial (Afrina, M., dkk., 2025). Anak-anak yang tumbuh dengan kesadaran bahwa pajak membiayai kebutuhan publik akan lebih cenderung menjadi warga negara yang patuh pajak ketika dewasa. Kesadaran ini muncul bukan karena takut terhadap sanksi, tetapi karena adanya pemahaman moral bahwa pajak adalah sarana untuk menjaga keadilan sosial. Dengan demikian, MBG menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk *tax culture* yang berkelanjutan.

Pendidikan pajak yang bersumber dari program sosial seperti MBG juga memperkuat nilai keadilan dan solidaritas sosial di kalangan siswa. Mereka melihat bahwa negara berperan dalam membantu kelompok yang membutuhkan tanpa diskriminasi. Hal ini membentuk pandangan positif terhadap pemerintah dan sistem fiskal sebagai alat pemerataan kesejahteraan. Ketika nilai keadilan sosial ini tertanam sejak dulu, generasi muda akan tumbuh menjadi individu yang tidak hanya memahami pajak sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bentuk moralitas publik.

Pemerintah dapat memperluas dampak pendidikan pajak melalui kolaborasi antara sekolah dan lembaga perpajakan. Misalnya, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengadakan program "Pajak Masuk Sekolah" yang dikaitkan langsung dengan MBG. Dalam kegiatan ini, siswa tidak hanya diperkenalkan pada konsep perpajakan, tetapi juga diajak melihat bagaimana pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai kebutuhan mereka sehari-hari. Pendekatan integratif seperti ini dapat menumbuhkan pemahaman menyeluruh bahwa keberhasilan fiskal negara berawal dari kesadaran individu sejak dulu. Efek pendidikan pajak yang ditimbulkan MBG juga memperkuat hubungan antara keluarga, sekolah, dan pemerintah. Orang tua yang mengetahui bahwa program makanan anaknya dibiayai dari pajak mulai mengubah cara pandang terhadap kewajiban fiskal. Mereka lebih terbuka untuk mendukung kegiatan sosialisasi pajak di sekolah dan masyarakat. Hubungan sinergis antara keluarga dan lembaga pendidikan ini memperluas dampak program hingga ke ranah sosial yang lebih luas, menjadikan kesadaran pajak sebagai budaya komunitas, bukan sekadar pemahaman individu.

Dalam jangka panjang, generasi yang tumbuh dengan pemahaman fiskal yang baik akan menjadi modal sosial bagi keberlanjutan pembangunan negara. Mereka akan lebih rasional dalam menilai kebijakan fiskal, lebih kritis terhadap pengelolaan pajak, dan lebih aktif dalam mengawasi anggaran publik. Dengan kata lain, MBG tidak hanya membentuk individu yang sehat secara fisik, tetapi juga masyarakat yang sehat secara ekonomi dan moral. Hal ini sangat penting untuk membangun tata kelola fiskal yang transparan dan partisipatif di masa depan. Namun, untuk menjaga kesinambungan efek pendidikan pajak melalui MBG, diperlukan kurikulum pendidikan yang mendukung. Pemerintah dapat memasukkan materi literasi fiskal dan tanggung jawab sosial ke dalam kurikulum nasional. Dengan cara ini, pengalaman siswa dalam menikmati program MBG akan diperkuat oleh pemahaman teoretis yang lebih mendalam. Sinergi antara pendidikan formal dan pengalaman sosial akan memperkokoh kesadaran pajak sebagai bagian dari nilai kebangsaan.

Akhirnya, pendidikan pajak melalui MBG membentuk siklus pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Generasi muda yang sadar pajak akan tumbuh menjadi warga negara yang patuh dan berintegritas, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan fiskal negara. Mereka akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya, menciptakan rantai kesadaran pajak yang tidak terputus. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi kebijakan gizi, tetapi juga instrumen strategis dalam menciptakan masa depan fiskal yang kuat, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai kebijakan sosial untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen efektif dalam membangun kesadaran fiskal dan kepatuhan pajak. Transparansi dan akuntabilitas fiskal dalam pelaksanaan MBG memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus menegaskan fungsi pajak sebagai sumber utama pembiayaan kesejahteraan sosial. Sosialisasi pajak yang terintegrasi melalui program ini berhasil menghadirkan edukasi fiskal yang kontekstual, menumbuhkan motivasi moral masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan secara sukarela. Selain itu, perubahan persepsi masyarakat terhadap pemerintah yang lebih positif menciptakan fondasi *trust-based governance* yang mendukung keberlanjutan kebijakan fiskal. Efek jangka panjangnya juga tampak dalam pendidikan pajak di kalangan generasi muda, di mana anak-anak belajar secara nyata bahwa pajak adalah wujud gotong royong nasional untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pengentasan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi sarana membangun budaya pajak yang berkelanjutan, adil, dan partisipatif demi mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, T. P. (2024). *Desain Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif*. CV Gita Lentera.
[https://books.google.co.id/books?id=rfoUEQAAQBAJ&lpg=PA27&ots=Iw8Crs9K99&dq=Adji%20T.%20P.%20\(2024\).%20Desain%20Penelitian%20Kualitatif.%20Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20\(Vol.%2027%20A27\).%20&lr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=rfoUEQAAQBAJ&lpg=PA27&ots=Iw8Crs9K99&dq=Adji%20T.%20P.%20(2024).%20Desain%20Penelitian%20Kualitatif.%20Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20(Vol.%2027%20A27).%20&lr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false)

- Agatha, A. (2022). *Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Tax Morale Calon Wajib Pajak Potensial (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma. Universitas Buddhi Dharma.* <http://repository.buddhidharma.ac.id/>
- Afrina, M., Harahap, M. R. S. M., Mawatdah, T. W., & Vientiyani, D. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpjakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 41-50. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5392>
- Amin, H. M., MM, M. A., Wahyunadi, S. E., & Baehaqi, H. (2024). (2024). *Membangun Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Deepublish. https://deepublishstore.com/produk/buku-membangun_kapasitas-fiskal-daerah-untuk-kesejahteraan_rakyat/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=book_mark
- Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutsoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik *Good Governance* di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88>
- Heliany, I. (2021, March). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Stiami* (Vol. 8, No. 1, pp. 15-21). <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1362>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.79>
- Martina, M., & Devy, T. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah:(Studi Kasus Kabupaten Pasaman). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(5), 1216-1238. <http://j-economics.my.id/index.php/home/article/view/300>
- Nataherwin, N., & Maren, E. (2021). Pengetahuan Pajak Kepada Siswa-Siswi Sma Kristen Almasih. *Prosiding SENAPENMAS*, 495. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15033>
- Pasamba, E. M., & Temalagi, S. (2023). Peningkatan Literasi Perpjakan pada Masyarakat di Desa Jabulenga Kecamatan Pulau-Pulau Aru. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 147–152. <https://doi.org/10.59632/abdiunisap.v1i2.183>
- Pujiyanti, E., Azizah, F. N., Hanita, J. P., & Malik, A. (2025). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Di Era Modern.. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 143–155. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i3.894>

- Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari S, L., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.660>
- Ridwan, M., Maesaroh, S., & Sari, S. W. (2024). Pengaruh Alokasi Pajak Untuk Program Makan Gratis Terhadap Kualitas Pendidikan: Studi Kuantitatif Di Sekolah Dasar Kota Cirebon. *Journal Central Publisher*, 2(8), 2363–2371. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i8.490>
- Santoso, A., Melianawati, B. D., & Ayuningtyas, E. A. (2025). *Governance Analysis Of The Implementation Of The Free Nutritious Meal Program*. 4(1). <https://doi.org/10.58290/jmbo.v4i1.423>
- Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*, 1(2), 191–196. <https://journalwbl.com/index.php/jupensal/article/view/176>
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. [https://books.google.co.id/books?id=biAfEQAAQBAJ&lpg=PA1&ots=BbvHfPJNBK&dq=Setiawan%2C%20I.%20\(2024\).%20Pengawasan%20pemerintahan%20dalam%20ulasan%20teori%20dan%20praktek.&f=false](https://books.google.co.id/books?id=biAfEQAAQBAJ&lpg=PA1&ots=BbvHfPJNBK&dq=Setiawan%2C%20I.%20(2024).%20Pengawasan%20pemerintahan%20dalam%20ulasan%20teori%20dan%20praktek.&lr&pg=PA1#v=onepage&q=Setiawan,%20I.%20(2024).%20Pengawasan%20pemerintahan%20dalam%20ulasan%20teori%20dan%20praktek.&f=false)
- Shenia, A. S., Maksum, A., & Affandi, M. (2025). Studi Kasus Dampak Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Semangat Belajar Siswa di SD Negeri 38 Palembang. *Indonesian Journal Of Education*, 2(1), 389-392. <https://doi.org/10.71417/ije.v2i1.533>
- Sukma, L. A., & Nabila, T. D. (2025). Analisis Pengelolaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Akuntabilitas Keuangan di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 406–417. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3784>
- Suprapto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). *A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program*. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 297-312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>
- Umam, K., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Model Pembiayaan Pendidikan Yang Berkelanjutan: Kajian Konseptual Dari Perspektif Ekonomi Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 878-887. <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i3.654>
- Winda, N. L., Yasa, I. N. P., & Dharmawan, N. A. S. (2025). Perilaku Meboya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 87-96. <https://doi.org/10.38043/jiab.v10i1.6892>
- Yanti, N. N. K. (2025). Mengoptimalkan Kepercayaan Masyarakat Di Indonesia: Menggali Peran Good Governance Dan E-Government. *Locus*, 17(1), 1-11. <https://doi.org/10.37637/locus.v17i1.2223>